

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

PERAN ASIA PACIFIC NETWORK FOR SEX WORKERS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP SEX WORKERS DI INDIA

Situasi pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah India menerapkan beberapa kebijakan seperti *lockdown* untuk menekan dan mengantisipasi kemungkinan penyebaran virus yang lebih buruk di kemudian hari. Dengan adanya pembatasan interaksi sosial yang bersifat sangat ketat, kondisi ini yang kemudian mengancam keberlangsungan hidup para pekerja seks komersial di India yang secara langsung menyebabkan hilangnya sumber pendapatan utama mereka dalam menyediakan jasa pemuas kebutuhan seksual. Dalam hal ini, *Asia Pacific Network for Sex Workers* (APNSW) hadir untuk bisa mengupayakan perlindungan *sex workers* di India agar dapat tetap bertahan hidup dengan bantuan yang diberikan. Sesuai dengan teori yang dijabarkan oleh David Lewis, NGO sebagai sebuah lembaga dapat menjalankan peran sebagai *Implementers*, *Catalysts*, dan *Partners* yang secara eksklusif terlibat langsung dalam berbagai proyek dan program kerja organisasi. Berfokus kepada pemberian perlindungan terhadap *sex workers* di India pada masa pandemi Covid-19, adapun peranan yang dimiliki oleh APNSW akan dijelaskan secara spesifik berdasarkan 3 indikator tersebut.

Kehadiran APNSW di India sudah dimulai sejak tahun 1995 dimana untuk pertama kalinya organisasi tersebut berkontribusi membentuk sebuah lembaga nasional yang ditujukan untuk melindungi hak pekerja seks di negara tersebut. Melalui *Durbar Mahila Samanwaya Committee* (DMSC), organisasi tersebut berupaya menjadi wadah yang dapat merepresentasikan suara seluruh *sex workers* di India. Pada tahun 1992, pembentukan

organisasi ini juga diawali dengan diselenggarakannya evaluasi dan *monitoring* di bawah pengawasan Dr. Smarajit Jana yang secara mandiri mengadakan penelitian mengenai isu dalam kehidupan *sex workers* yang memerlukan perhatian khusus seperti hak-hak pekerja seks, pendidikan anak (bagi yang sudah berkeluarga), strategi dalam menghadapi kekerasan polisi terhadap *sex workers*, dan penyuluhan terhadap seluruh konsumen agar mau menerapkan protokol pencegahan penularan penyakit seksual (Godwin, 2012).

5.1 Peran APNSW Sebagai *Implementers*

Kegagalan pemerintah India dalam menyediakan jaminan perlindungan bagi beberapa kelompok masyarakat marginal yang dapat dilihat dari inefisiensi regulasi pemberian bantuan dan kurangnya transparansi terhadap masyarakat luas. Salah satu program yang sempat dilakukan oleh pemerintah, yaitu pemberdayaan para pekerja seks komersial berupa program Hunar Jyoti (memberdayakan dengan cara melatih para *sex workers* agar beralih menjadi seniman dan menghasilkan prakarya yang dapat dijual untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari) juga dinilai masih kurang efektif mengingat daya beli akan kerajinan tangan pada masa pandemi Covid-19 yang dipastikan menurun (Ahdira, 2020). Keterbatasan pemerintah dalam memberikan jaminan hidup yang lebih baik terhadap para pekerja seks komersial di India tentunya mendorong beberapa gerakan bantuan dari berbagai pihak mengingat jumlah pekerja seks di negara Anak Benua tersebut merupakan yang tertinggi di wilayah Benua Asia. Kondisi tersebut memicu banyak inisiatif dari berbagai lembaga, salah satunya APNSW yang sejak tahun 1994 telah berkontribusi dalam menjamin keamanan dan keadilan bagi para *sex workers* di Asia Pasifik.

Berperan sebagai *Implementers*, dalam hal ini APNSW mendasarkan diri pada indikator distribusi bantuan dan pemberian fasilitas tambahan bagi anggota keluarga *sex workers* yang turut merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, *Implementers*

juga dapat diindikasikan melalui pengadaan program secara mandiri yang ditujukan untuk mencapai target tujuan yang ingin dicapai dari diadakannya lembaga tersebut. Berfokus kepada APNSW, lembaga ini berusaha untuk memastikan persediaan pangan dan bantuan logistik lainnya dapat berjalan sesuai dengan rentang waktu dan target yang telah ditetapkan. Persediaan tersebut secara kolektif didapatkan dari berbagai sumber seperti donasi individu, kelompok sosial-keagamaan, pelaku/pejabat politik dan pihak kepolisian. Bantuan yang diberikan berfokus kepada beberapa wilayah distrik Kolkata yang secara eksklusif juga berusaha untuk merangkul beberapa komunitas LGBT dan kelompok masyarakat marginal lainnya. Secara spesifik, APNSW menyalurkan bantuan pangan berupa biskuit, gandum, buku pelajaran dan latihan, serta pensil mewarnai yang secara eksklusif ditujukan bagi anak-anak dari para pekerja seks tersebut. Aktivitas pemberian bantuan ini terus dilakukan seiring berjalannya waktu dan secara resmi sudah dipastikan akan memasuki periode bantuan untuk ketiga kalinya. Adapun jenis bantuan yang diberikan terhadap *sex workers* di India selama pandemi Covid-19 akan dijabarkan secara spesifik melalui tabel berikut.

5.1.1 Capacity Building

a. Community Led Structural Intervention (CLSI)

Beberapa penelitian terdahulu secara eksklusif mengemukakan bahwasanya pekerja seks komersial yang tercatat memiliki status keanggotaan dalam sebuah organisasi atau CSLI secara langsung cenderung memiliki tingkat kesejahteraan dan keamanan yang lebih tinggi terlebih dapat bersifat lebih mandiri dalam melawan aksi kekerasan yang masih kerap terjadi dalam industri pekerja seks komersial (Ali, Chaudhuri, Ghose, & Jana, 2020). Secara spesifik, berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19, keanggotaan *sex workers* dalam suatu organisasi

turut membantu aksesibilitas terhadap bantuan pemerintah yang sempat terkendala pada persyaratan administratif seperti kartu identitas dan kartu sembako. Secara lebih lanjut pada bagian ini, APNSW turut mengadakan kegiatan yang biasa disebut *Community Led Structural Intervention (CLSI)* yang secara masif ditujukan untuk menaungi program *Intervention HIV* yang tersebar di 6 negara dengan indeks prevalensi terbesar di India yaitu Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh, Manipur dan Nagaland.

Inisiatif ini dilakukan mengingat minimnya pemberian fasilitas pemerintah di India yang berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan penanganan HIV. Berdasarkan publikasi yang berjudul "*A Continuing Battle : Profiling An Inspiring Journey To Regain Rights & Dignity Of A Sex Workers' Collective*", terdapat 3 strategi yang saling berkaitan satu sama lain dalam mendukung implementasi kegiatan tersebut, antara lain :

- a. Mengadakan mobilisasi terhadap masyarakat dalam segi aspek politik dan sosial. Hal ini diharapkan mampu sekaligus menimbulkan kesadaran dari banyak pihak terkhusus pemangku kebijakan agar kedepannya fasilitas yang berfokus kepada pelayanan kasus HIV dapat dihadirkan dengan baik di negara tersebut.
- b. Membentuk lingkungan yang bersifat mendukung dan memadai, mencakup konsistensi perilaku dan praktik-praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya situasi tersebut, dalam lingkup masyarakat, diharapkan dapat terbentuk konsepsi keamanan dan keadilan bagi setiap individu yang berprofesi sebagai *sex workers*.

c. Kepemilikan atas produk atau hasil yang didapatkan dari kegiatan intervensi-pengembangan. Melihat rekam jejak yang dimiliki oleh APNSW, bukan tidak mungkin jika dampak yang dihasilkan bersifat signifikan dan masif cakupannya. Melalui keterlibatan masyarakat, organisasi tersebut memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh aspek yang terlibat didalamnya sehingga terbentuk sikap kepemilikan atas pengembangan, implementasi, dan manajemen program yang dijalankan.

Kegiatan tersebut tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan *sex workers* di India dalam hal aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan dan penanggulangan penyakit yang berkaitan dengan HIV. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya selain ancaman secara finansial, *sex workers* di India bahkan di seluruh dunia juga turut mengalami ancaman kesehatan berupa resiko terpapar virus Covid-19 yang lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya. Hal ini dibuktikan dengan informasi dari situs *World Health Organization* yang menjelaskan bahwasanya pasien yang mengidap HIV lebih berisiko untuk terserang penyakit infeksi dan memiliki prevalensi lebih tinggi dalam faktor-faktor risiko komplikasi Covid-19 (WHO, 2022). Dengan adanya program ini, kondisi negara India yang masih sangat tinggi akan kasus penyebaran virus Covid-19 dapat berangsur-angsur berkurang.

b. *Immersion Learning Programme & Community Led Capacity Assesment and Building (CLCAB)*

Untuk mendukung program CLSI pada bagian sebelumnya, APNSW melakukan kegiatan pelatihan dan *mentoring* berupa metodologi pembelajaran *Immersion Learning Programme* dalam Program Intervensi HIV/AIDS di

India. Melalui kegiatan ini, para partisipan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bisa belajar secara eksperimental dan integrasi dengan penyesuaian lingkungan belajar yang kondusif dan memadai. Setiap partisipan diberikan kebebasan untuk bisa memainkan peran sebagai guru (tenaga pengajar), maupun audiens. Kegiatan ini semakin difokuskan untuk mencapai target yang diinginkan terlebih di masa pandemi Covid-19 yang semakin menghambat para *sex workers* dalam mengakses fasilitas kesehatan HIV.

Selain *Immersion Learning Programme*, program lain yang ditujukan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya *sex workers* di India digalangkan melalui *Community Led Capacity Assesment and Building (CLCAB)* yang secara langsung mengikutsertakan anggota/teman sebaya komunitas, ketua komunitas, konsultan senior, dan para ahli yang telah menggeluti *HIV Intervention Programme* dengan persyaratan minimal 10 hingga 14 tahun di Kota Sonagachi. Secara spesifik, adapun aktivitas pembangunan kapasitas dan karakter dari keseluruhan partisipan organisasi tersebut antara lain :

- a. Pemetaan dan identifikasi dinamika jenis-jenis hambatan yang dihadapi secara struktural.
- b. Pendataan jenis-jenis kebutuhan.
- c. Fasilitasi dalam model progresi teman sebaya (*peer group*).
- d. Pengembangan sistem komunitas berbasis pemrograman untuk manajemen *Sexually Transmitted Infectious (STI)*, advokasi, keuangan secara mikro, dan lain-lain.
- e. Pengembangan komunitas melalui program *anti-trafficking*.

- f. Pembentukan dan pengembangan usaha koperasi secara intens dengan tujuan untuk menciptakan finansial ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

Dengan mengikutsertakan setiap anggota organisasi agar aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut, tujuan utama yang ingin dicapai oleh APNSW berpusat kepada bagaimana setiap *sex workers* tersebut dapat secara langsung mempelajari dan menerapkan apa yang terlihat dan apa yang dilakukan. Berdasarkan konsep "*learning by doing*", pekerja seks tersebut diharapkan mampu secara mandiri melakukan tindakan dan aksi preventif dalam mencegah penyebaran HIV. Program *Immersion Learning Programme* dan *Community Led Capacity Assesment and Building* tersebut secara eksklusif dapat menjadi wadah komunikasi antar anggota dan pengurus organisasi melalui konsultasi dan penyuluhan yang diselenggarakan.

c. Dream Building Programme

Dream Building Programme juga menjadi salah satu strategi untuk bisa memperbaiki "citra" para *sex workers* sekaligus menekan stigma yang dilabeli oleh tatanan masyarakat sosial. Dibawah pengawasan Dr. S. Jana selaku penasehat utama organisasi DMSC, program ini secara eksklusif ditujukan untuk memberdayakan para *sex workers* untuk menentang dan melawan stigma dan praktik-praktik diskriminasi dalam kehidupan sosial yang mereka jalani. Para pekerja seks tersebut didorong untuk meningkatkan kepercayaan diri, sesederhana dimulai dengan cara menganggap diri mereka sebagai seorang "pekerja seks" dibandingkan seorang "prostitusi". Berdasarkan riset kerja sama yang dilakukan bersama *Department of Economics, Warwick University*, adapun dampak dan hasil yang didapatkan melalui program ini antara lain :

- a. 68% dari total koresponden secara keseluruhan menganggap dirinya memperoleh rasa percaya diri lebih.
- b. Jika dibandingkan dengan pekerja seks yang tidak mengikuti kegiatan tersebut, pekerja seks yang mengikuti program *workshop* tersebut cenderung mengalami peningkatan dalam hal riwayat kunjungan ke dokter.
- c. *Sex workers* yang mengikuti program tersebut dilaporkan 12% merasa lebih senang dan tidak malu atas profesi yang sedang digeluti.

Keterpurukan yang dialami oleh setiap *sex workers* selama pandemi Covid-19 berlangsung tentu memberikan tekanan dan ancaman terhadap mental secara khusus. Meningat situasi pandemi yang bersinggungan langsung dengan kondisi kesehatan yang harus bersifat primer secara permanen, kondisi kejiwaan para pekerja seks tersebut tentu diharapkan mampu berada dalam siklus yang stabil dan terarah. Dengan adanya program pelatihan dan *workshop* yang diselenggarakan oleh APNSW, memberdayakan setiap anggota merupakan salah satu agenda terpenting untuk terus dilakukan. Audiensi dan penyuluhan terhadap masyarakat juga terus digalangkan untuk menekan stigmatisasi yang masih kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat sosial di India sehingga rasisme dan diskriminasi dapat berkurang di kemudian hari.

5.1.2 Distribusi Bantuan

Hilangnya pendapatan sehari-hari dalam berprofesi sebagai *sex workers* ketika pandemi Covid-19 di India, menyebabkan munculnya masalah baru berupa keterbatasan finansial yang berujung kepada kemunculan kesenjangan sosial. Selain stigmatisasi dan diskriminasi yang masih sangat melekat pada pekerja seks tersebut,

kelompok masyarakat marginal tersebut masih harus dihadapkan dengan tantangan untuk bertahan hidup meskipun tanpa memiliki penghasilan yang jelas dan tetap. Kebijakan *lockdown* dan pembatasan dalam rentang jarak interaksi satu sama lain menjadi alat yang dapat memicu larangan bertransaksi dalam aktivitas seksual. Selain resiko dalam masa sekarang, untuk resiko jangka panjang, para *sex workers* di seluruh dunia bahkan terancam kehilangan konsumen dan harus memulai dari awal dalam menjangkau setiap klien dalam industri kerja seks tersebut.

Berdasarkan wawancara yang diselenggarakan oleh salah satu reporter BBC News, salah satu pekerja seks di Australia bahkan mengaku telah mencoba mengalihkan alternatif pekerjaannya melalui media perantara online namun hasilnya tetap nihil. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor kausalitas seperti keterbatasan klien sebagai konsumen dalam menggunakan sosial media dan teknologi terkini, serta sulitnya menentukan standar pelayanan seksual yang sesuai dengan konsumen yang ada (Nunis, 2020). Inisiatif yang muncul dari pekerja seks tersebut secara tidak langsung menunjukkan tidak adanya harapan untuk terus bertahan hidup tanpa adanya bantuan dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga. Contoh tersebut yang kemudian dapat dijadikan contoh atau sampel mengenai bagaimana beberapa kelompok masyarakat marginal di beberapa negara bahkan di seluruh dunia, berada di ambang kelaparan dan kemiskinan akan dampak destruktif yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19.

Memfokuskan diri kepada APNSW, organisasi tersebut secara inisiatif telah mengumpulkan berbagai bantuan berupa bahan pangan dan beberapa peralatan kebutuhan hidup yang dirasa perlu untuk disalurkan kepada seluruh *sex workers* di India tanpa terkecuali. Secara umum, berdasarkan data yang telah didapat, adapun distribusi bantuan yang telah diberikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2.a Distribusi Bantuan Per-17 Juli 2020 (*Red Light Districts in Kolkata*)

<i>Name</i>	<i>Frequency of distribution</i>	<i>Materials</i>
Sonagachi	14 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kentang, bawang, garam, kedelai potong, biskuit, sabun, pasta gigi, <i>sanitizer</i> , pembalut wanita dan gula.
Bowbajar	30 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kentang, bawang, garam, kedelai potong, biskuit, sabun, pasta gigi, <i>sanitizer</i> , pembalut wanita, tepung terigu dan sayur-sayuran.
Rabindra Sarani dan Ultadanga	10 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kentang, bawang, garam, kedelai potong, biskuit, sabun, pasta gigi, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Sethbagan dan Rambagan	10 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kentang, bawang, garam, kedelai potong, biskuit, sabun, pasta gigi, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita. <ul style="list-style-type: none"> • Gratis makanan yang telah dimasak selama satu bulan.
Tollygunj	8 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kentang, bawang, garam, kedelai potong, biskuit, sabun, pasta gigi, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Khidirpur	9 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kentang, bawang, garam, kedelai potong, biskuit, sabun, pasta gigi, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Kalighat	7 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kentang, bawang, garam, kedelai potong, biskuit, sabun, pasta gigi, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Lokhar Math	8 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kentang, bawang, garam, kedelai potong, biskuit, sabun, pasta gigi, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Chetla	7 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kentang, bawang, garam, kedelai potong, biskuit, sabun, pasta gigi, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.

Tabel 5.2.b Distribusi Bantuan Per-17 Juli 2020 (*Red Light Districts outside Kolkata*)

<i>Name</i>	<i>Frequency of distribution</i>	<i>Materials</i>
Budgebudge	11 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.

Daimond Harbour	6 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Shantipur	5 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Nabadweep	5 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Kalna	6 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Siuri	5 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Durgapur	5 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Asansol	9 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> , telur dan pembalut wanita. <ul style="list-style-type: none"> • Makanan saji sejak pertama kali diberlakukan <i>lockdown</i> (135 hari)
Bishnupur	9 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Kharagpur	5 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Mahisadol	2 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita. <ul style="list-style-type: none"> • Gratis makanan yang telah dimasak selama satu bulan.
Kanthi	10 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Ghatal	4 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Titagarh	19 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Naihati	5 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Baharampur	2 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Domkal	7 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Dhulian	4 kali	Rice, Pulse, Mustard Oil, Soyabean chunks, Biscuits, Soap, Sanitizer, Sanitary Napkins
Malda	9 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
		Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong,

Coochbehar	25 kali	biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Alipurduar	5 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Dinhata	7 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Siliguri	10 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Jalpaiguri	15 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Domjur	13 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Amta	12 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Uluberia	10 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Rajgunj	8 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Bandhaghat	8 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Seoraphuli	13 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita. <ul style="list-style-type: none"> • Gratis distribusi makanan yang telah dimasak selama 3 bulan.
Pandua	5 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Shasan	3 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Basirhat (Matia)	8 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.
Kalinagar	5 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> dan pembalut wanita.

Tabel 5.2.c Distribusi Bantuan Per-17 Juli 2020 (Masyarakat Umum dan Komunitas LGBT yang terdampak *lockdown* dan Fenomena Alam Amphan)

<i>Name</i>	<i>Frequency of distribution</i>	<i>Materials</i>
Kadapara	4 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> , pembalut wanita dan pasta gigi.

Dhapa	2 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> , pembalut wanita dan pasta gigi.
Chingrighata	1 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> , pembalut wanita dan pasta gigi.
Tangra	1 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> , pembalut wanita dan pasta gigi.
Telinipara	1 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> , pembalut wanita dan pasta gigi.
Bhatpara	2 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, kedelai potong, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> , dan pembalut wanita.
Dumdum	1 kali	Beras, kacang-kacangan, biskuit, sabun, <i>sanitizer</i> , gandum dan pembalut wanita.
Janbazar	1 kali	Beras, kacang-kacangan, minyak sawi, Sattu (tepung khas India), sabun dan <i>sanitizer</i> .

Sumber :DMSC's Relief Write Up 2021

Berdasarkan data yang telah disajikan, dapat dilihat bagaimana peran yang dilakukan oleh APNSW yang telah aktif dalam mengupayakan perlindungan dan keselamatan para *sex workers* di India selama masa pandemi Covid-19 berlangsung. APNSW, organisasi non-pemerintah tersebut secara intens telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan krusial dalam kehidupan *sex workers* mencakup bahan pangan seperti beras, gandum, kacang-kacangan dan kentang yang mana menjadi bahan utama dalam membuat makanan untuk dikonsumsi sehari-hari. Selain itu, usaha preventif dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 juga digalangkan melalui pembagian alat-alat yang mendukung penerapan protokol kesehatan seperti sabun dan *sanitizer*. Hal ini tentu dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya upaya yang dilakukan secara kolektif dalam menekan tingginya intensitas penyebaran virus Covid-19 di negara “Anak Benua” tersebut. Pemberian bantuan berupa pembalut terkhusus kepada perempuan yang berprofesi sebagai *sex workers* juga diadakan mengingat hilangnya penghasilan yang biasa didapatkan menyebabkan perempuan-perempuan tersebut tidak dapat membeli pembalut secara mandiri.

5.2 Peran APNSW Sebagai *Catalysts*

Sebuah NGO dapat berperan dalam mengubah perspektif dan cara berpikir sebuah masyarakat atau aktor politik lainnya sehingga kedepannya terjadi suatu perubahan sesuai dengan target yang diharapkan. APNSW bergerak sebagai katalis dengan caramemberdayakan setiap anggota melalui berbagai jenis pelatihan dan penyediaan fasilitas kesehatan dengan harapan, kedepannya stigma dan tindakan yang terkesan rasis dan diskriminasi terhadap *sex workers* berangsur-angsur dapat berkurang seiring berjalannya waktu. Adapun upaya yang dijalankan oleh APNSW sebagai wujud implementasi NGO sebagai katalis adalah sebagai berikut(Dey, 2015).

5.2.1Advokasi Bidang Sosial, Budaya, dan Tantangan Struktural

APNSW secara spesifik menggalangan advokasi dan kampanye terhadap *Social Policy Makers* (pembuat kebijakan sosial) dan *Social Stakeholders* (pemangku kebijakan) dengan harapan secara langsung dapat mempengaruhi beberapa peraturan yang dianggap bersifat diskriminasi terhadap keberadaan *sex workers*. Hal ini juga ditujukan kepada masyarakat sosial yang dalam praktik kesehariannya, masih sangat sering bersikap rasis dan membatasi diri terhadap *sex workers* di India. Dalam lingkup *Social Policy Makers*, APNSW secara langsung melakukan advokasi dengan mengikutsertakan beberapa serikat pekerja, *women organizations*, akademisi dan cendekiawan negara yang dianggap memiliki pengaruh dan peranan penting dalam menetapkan nilai-nilai, norma sosial, dan praktik-praktik dalam kehidupan sehari-hari. Strategi ini dilakukan dengan cara mengadakan seminar, debat dan lokakarya dimana organisasi tersebut dapat menyebarkan informasi dan pesan moral yang ingin disampaikan. Mengingat interaksi terhadap audiens yang didapatkan secara langsung, kampanye bermaksud

untuk menentang dan merubah “citra awal” *sex workers* yang dinilai buruk atau biasa disebut “*mindset mainstreaming*”.

Advokasi terhadap *Social Stakeholders* juga dilakukan melalui partisipasi dalam penyuluhan tingkat media untuk mencegah praktik eksploitasi dan aktivisme sosial untuk bisa berhubungan langsung dengan para pemangku kebijakan. Secara spesifik, strategi ini juga diterapkan dengan mengadakan pertemuan bersama anggota parlemen yang menjabat, kandidat parlemen yang akan mengikuti pemilu, serta pengaturan kunjungan lapangan untuk para pembuat kebijakan, akademisi, pengelola program, dan lain-lain. Organisasi non-pemerintah tersebut juga menyelenggarakan *National Conference of Entertainment Workers*, Konvensi Tingkat Negara Bagian (pertemuan wilayah administratif di Negara Bagian India), 7 Melas (festival yang bertemakan banyak isu sosial), dan beberapa kampanye dan gerakan sosial seperti “*Rights to Food*”, “*Rights to Information*”, “*Rights to Education*”, dan Pension Parishad (tuntutan agar pensiunan bersifat universal terutama bagi perempuan) (Dey, 2015). Strategi tersebut secara masif dijalankan untuk menunjukkan eksistensi dan kontribusi melalui keterlibatan organisasi yang menaungi *sex workers* tersebut dalam lingkup masyarakat secara luas sehingga kedepannya kehadiran para pekerja yang bergerak di bidang industri seks komersial dapat diterima dengan baik. Meskipun terkesan sulit dan bahkan mustahil, langkah-langkah tersebut diharapkan mampu untuk mengurangi tingginya intensitas aktivitas rasis dan diskriminasi terhadap *sex workers* di negara tersebut. Terlebih pada situasi pandemi saat ini.

Pada tahun 2020, setelah APNSW melakukan identifikasi dan penelitian secara mendalam, Pengadilan Tinggi India secara resmi menanggapi dan menerima

desakan yang diberikan dalam menyalurkan bantuan kepada *sex workers* yang diakibatkan oleh hilangnya pendapatan akibat aktivitas *lockdown* yang diberlakukan. Meskipun pada awalnya bantuan berupa dana yang dijanjikan tidak diberikan, APNSW secara konsisten terus melakukan survey ke setiap rumah bordil di berbagai distrik di India untuk terus memastikan bahwasanya setiap *sex workers* di seluruh wilayah dapat bertahan hidup dan terhitung ada sekitar 50.000 *sex workers* yang menerima bantuan berupa jatah makanan (Nascimento, 2021). Melihat upaya yang dilakukan oleh APNSW tersebut, hal ini yang kemudian menghasilkan vonis dari Mahkamah Agung di India berupa keputusan yang membebaskan kewajiban *sex workers* dalam menunjukkan kartu identitas dalam mengakses bantuan sembako yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini tentu merupakan salah satu pencapaian yang sangat besar mengingat banyak *sex workers* di India yang mengaku sulit dalam menerima bantuan pemerintah akibat kendala dan keterbatasan dalam memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan.

5.2.2 Komal Ghandar

Industri kerja seks menuntut sumber daya di dalamnya untuk bisa menjadi alat atau media hiburan. *Sex workers* di India juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan seni hiburan berupa pertunjukan seperti pementasan teater, permainan musik, dan keterampilan menari. Melihat situasi tersebut, APNSW menyadari adanya potensi dalam mempromosikan tujuan dan tuntutan yang ingin dicapai mengenai hak serta keadilan terkait “pekerja seks” sebagai sebuah profesi. Pertunjukan ini secara terstruktur diadakan mengikuti beberapa perayaan hari besar dan kegiatan tertentu dan secara spesifik terdapat beberapa pertunjukan kebudayaan yang dapat ditampilkan seperti pantomim, tari-tarian tradisional, drama

musikal, paduan suara, dan beberapa pertunjukan lainnya (Purkayastha, 2021).Melihat rekam jejak yang dimiliki, upaya ini telah berhasil mendapatkan apresiasi publik dan semakin populer baik dari kalangan masyarakat lokal maupun luar negeri.

Pada masa pandemi Covid-19, upaya ini terus dilakukan dengan tetap menyesuaikan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.Selain untuk menyuarkan urgensi dalam memberikan perlindungan terhadap *sex workers* di masa pandemi, strategi ini juga digalangkan untuk membentuk sebuah identitas baru secara umum di seluruh wilayah India tanpa terkecuali. Sebagai contoh, pada 11 Oktober 2021 telah berhasil diselenggarakan *The Durga Festival* (salah satu festival Hindu Bengali terbesar di wilayah Sonagachi, India). APNSW melalui DMSC sebagai representasi turut berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan menampilkan beberapa penampilan tari dan pertunjukan musik serta suara(Roy, 2021).Kegiatan ini juga diisi dengan beberapa aksi solidaritas seperti pembagian bantuan berupa makanan dan *saree* (salah satu pakaian tradisional di India) kepada para pekerja seks yang hadir tanpa identitas ras dan agama yang dianut.Terbukti dengan diadakannya kegiatan tersebut, pekerja seks di Benggala Barat secara kolektif juga turut merayakan *The Durga Festival* melihat bagaimana solidaritas yang timbul setelah kegiatan di Sonagachi tersebut berlangsung.

Khomal Gandar secara langsung mewadahi sekaligus memberikan pembaharuan terhadap stigma yang menjadi label dalam kehidupan *sex workers* di India selama ini. Melalui sarana unjuk kreativitas tersebut, bukan tidak mungkin setiap pekerja seks dapat unjuk bakat dan keterampilan yang mereka miliki terlepas

dari profesi dan pekerjaan yang dilakukan. Situasi ini menimbulkan inklusivitas dalam aspek tatanan masyarakat sosial, yang kemudian secara persuasif dapat mendorong dan mengubah cara berpikir masyarakat untuk menciptakan lingkungan dan ruangan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

5.3 Peran APNSW Sebagai *Partners*

Dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap *sex workers* di India pada masa pandemi Covid-19, APNSW tentu banyak menjalin kerja sama kooperatif terhadap aktor-aktor lain untuk menghimpun segala jenis bantuan yang dapat disalurkan secara kolektif. Dalam hal ini, APNSW secara langsung mendapatkan dukungan berupa bantuan melalui beberapa pihak/lembaga donor seperti organisasi sosial-religius, pihak kepolisian, dan pihak pelaku/pejabat politik. Sebagai sebuah NGO, APNSW berhasil menunjukkan adanya korelativitas antara fungsi dan peranan NGO dalam tatanan politik saat ini dimana berdasarkan indikator orientasi dan kepentingan, sebuah lembaga non-pemerintah akan cenderung bekerja sama untuk memperbesar kesempatan jalinan relasi yang luas sekaligus sarana dalam memperkenalkan visi dan misi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Implementasi dari tindakan ini dapat dilihat dari interaksi kerja sama antara APNSW dan Azim Premji *Foundation* (salah satu NGO yang berfokus kepada edukasi anak-anak di wilayah pedesaan), dimana kedua lembaga tersebut berupaya untuk melihat tantangan dan hambatan yang menjadi keluhan para *sex workers* di India selama periode pandemi covid-19 berlangsung.

Berdasarkan observasi yang diselenggarakan oleh *Azim Premji University* pada Desember 2020, dengan fokus penelitian berupa pengamatan mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap kehidupan mata pencaharian para pekerja sektor informal, didapatkan sebuah hasil penelitian bahwasanya pandemi covid-19 berikutan kebijakan antisipatif yang

diterapkan oleh pemerintah, secara masif mengancam para pelaku kerja pada sektor informal tersebut terutama perempuan dan pekerja pada usia lanjut (Thakur, 2021). Muncul berbagai tantangan yang perlu untuk segera ditanggulangi, meliputi penciptaan lapangan pekerjaan yang baru (termasuk meningkatkan kualitas lapangan pekerjaan), penyediaan jaminan sosial yang bersifat memadai, serta fasilitas layanan publik yang kondusif. Dalam lingkup *sex workers* sendiri, penelitian ini mengemukakan fakta bahwasanya pendapatan dengan gaji tidak tetap, pekerjaan sebagai pekerja seks komersial bahkan justru semakin memprihatinkan dan secara khusus memerlukan bantuan dari banyak pihak untuk dapat bertahan hidup. Stigmatisasi yang muncul bahkan jauh sebelum pandemi covid-19 berlangsung menjadi latar belakang bagaimana *sex workers* memiliki ancaman yang bersifat destruktif tersendiri dibanding profesi lainnya.

APNSW juga melakukan kerja sama terhadap beberapa komunitas pengacara yang secara eksklusif ditujukan untuk mendukung seluruh partisipan dan anggota organisasi dari aktivitas diskriminasi dan pelecehan yang terjadi di rumah maupun tempat bekerja. Kerja sama di bidang hukum lainnya juga didasarkan kepada beberapa skema keamanan sosial mencakup *Immortal Traffic Prevention Act* (1956), *Child Marriage*, *Anti-Trafficking* dan aksesibilitas bantuan hukum melalui *District Legal Services Authority* (DLSA). Dari sisi lain, organisasi tersebut juga melakukan audiensi berupa pembentukan kerja sama terhadap pihak kepolisian setempat untuk menekan tingginya angka kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan oleh polisi terhadap *sex workers* di India. Terhitung pada tahun 2017, didapatkan data bahwa terdapat sebanyak 76.170 kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap *sex workers* (Dey, 2015). Hal ini dengan harapan agar kerja sama yang dilakukan dapat mengubah perspektif dan pandangan para pihak berwenang sehingga kekerasan terhadap *sex workers* di India dapat berkurang secara signifikan.

Dalam mempersiapkan bantuan di masa depan, APNSW juga turut melakukan kerjasama berupa penelitian secara mendalam mengenai kesulitan dan tantangan yang perlu untuk segera ditanggulangi dalam mengupayakan hak-hak *sex workers* di India. Dengan melakukan kolaborasi observasi bersama Taaras, salah satu lembaga koalisi pekerja seks perempuan yang menaungi 119.500 anggota didalamnya, didapati hasil survey berupa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh *sex workers* di India selama pandemi covid-19 (Singha, 2020), antara lain :

- a. Sulitnya akses terhadap layanan perlindungan sosial, mencakup informasi berdasarkan konsultasi yang dilakukan terhadap 5 negara bagian di india bahwasanya hanya 5% dari total keseluruhan *sex workers* di India yang telah mendapatkan bantuan uang tunai sebesar 1000 Rs berdasarkan kepemilikan Kartu Tenaga Kerja. Kebanyakan pekerja seks di India tidak memiliki aksesibilitas yang baik terhadap perlindungan sosial berupa pensiunan, tunjangan kesehatan dan hak-hak pekerja.
- b. Kurangnya akses terhadap layanan penting. Berdasarkan survey yang dilakukan, sebanyak 48% anggota tidak menerima jatah bantuan melalui PDS (*Public Distribution System*). Berdasarkan data yang terkumpul, dari jumlah laporan sebanyak 26.527 anggota yang mengalami sakit, sekitar 97% dari total laporan tersebut mengaku sulit dalam menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai baik dalam sektor publik maupun swasta. Sebanyak 20% dari *sex workers* yang memiliki anak yang menempuh pendidikan di sekolah swasta, sebanyak 95% (23.425) mengaku tidak mampu dalam membayar uang sekolah. Sebanyak 61% *sex workers* yang mendiami rumah dengan sistem sewa, 83% juga kesulitan dalam membayar uang sewa dan tagihan listrik per bulannya.

- c. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan, dimana terdapat sebanyak 71% (81.433) *sex workers* di India tidak memiliki pendapatan yang dapat menunjang standar kebutuhan makan sebanyak 2 kali sehari.

Melalui survey dan laporan observasi tersebut, APNSW secara langsung dapat mempengaruhi Mahkamah Agung untuk bisa mengarahkan pemerintah pusat agar secara khusus memperhatikan keluhan dan kendala yang dialami oleh *sex workers*, terlebih dalam fenomena sulitnya mengurus dokumen identitas yang diperlukan seperti Aadhar (nomor identitas yang sering digunakan untuk keperluan administratif otoritas di India), rekening bank dan kartu ransum. Aplikasi yang diselenggarakan berhasil mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan beberapa kebijakan tambahan seperti pemberian uang tunai sebesar 5000 Rs, tambahan uang tunai sebesar 2500 Rs bagi *sex workers* yang memiliki anak dalam masa sekolah, serta pasokan kebutuhan lainnya mencakup masker, *hand sanitizer*, sabun, obat-obatan dan alat-alat kebersihan lainnya yang dapat mendukung program pencegahan penyebaran virus covid-19.